

Pengaruh *Good Governance* Terhadap Kualitas Pemberian Layanan Publik

¹Dwi Susanto,
²Dian Anggraeni Yusuf, ³Yunaita Rachmawati

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk membantu memberikan pemahaman kepada para penyelenggara pemerintah daerah di Indonesia mengenai pentingnya penerapan good governance pada pelaksanaan operasional pemerintahan dalam rangka pemberian layanan publik. Data kualitas penerapan governance diambil dari Indonesia Governance Indeks 2012 (IGI 2012) yang berisikan peringkat kualitas penerapan good governance pada pemerintah daerah provinsi di Indonesia selama tahun 2012. Adapun kualitas pemberian layanan publik diukur dengan menggunakan data Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya pengaruh positif dari penerapan good governance terhadap kualitas pemberian layanan publik. Diharapkan temuan ini dapat menjadi perhatian bagi para penyelenggara pemerintahan daerah mengenai pentingnya penerapan good governance di lembaga pemerintahan dalam rangka meningkatkan kualitas pemberian layanan publik.

Kata-kata kunci: pemerintah daerah provinsi, good governance, Indonesia governance indeks indeks pembangunan manusia.

Pendahuluan

Good corporate governance bukanlah suatu isu yang baru bagi dunia usaha di Indonesia. Selepas krisis moneter yang terjadi di Indonesia pada tahun 1998, dunia usaha di Indonesia sudah mulai menyadari pentingnya penerapan *good governance* ini. Sejak saat itu, prinsip-prinsip *corporate governance* seperti transparansi, akuntabilitas, independensi, kewajaran ataupun keadilan mulai banyak diterapkan pada perusahaan-perusahaan di Indonesia. Penerapan *good corporate governance* tersebut telah banyak pula menunjukkan hasil yang

menggembirakan dalam menanggulangi praktek-praktek bisnis yang tidak sehat.

The Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG), bekerjasama dengan majalah Swa, sejak tahun 2001 telah mengadakan program rutin setiap tahun untuk mengevaluasi dan melakukan patok banding (*benchmarking*) terhadap praktek-praktek *good governance* yang dilakukan perusahaan-perusahaan di Indonesia. Hasil dari evaluasi tersebut diumumkan kepada masyarakat luas dalam bentuk *Corporate Governance Perception Index (CGPI)* atau indeks peringkat

perusahaan-perusahaan dalam melaksanakan prinsip-prinsip *good corporat governance*. Dalam melakukan evaluasi tersebut, IICG mendasarkan pada beberapa prinsip *good governance* yang juga berlaku di dunia bisnis International, yaitu antara lain komitmen, transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, kejujuran, kompetensi, kepemimpinan, kemampuan bekerjasama, visi, misi dan tata nilai, strategi dan kebijakan, etika bisnis, serta budaya risiko.

Terdapat suatu pertanyaan yang menarik pada sektor publik di Indonesia berkenaan dengan isu *good governance* ini, yaitu apakah pada sektor publik, khususnya pada lembaga-lembaga negara dan pemerintahan, dapat juga diperkenalkan dan diterapkan prinsip-prinsip *good governance*. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggali ada tidaknya usaha-usaha penerapan *good public governance* di Indonesia serta ada tidaknya pengaruh kualitas penerapan *good governance* terhadap kualitas pelayanan publik pada lembaga-lembaga pemerintah di Indonesia. Fokus dari penelitian ini adalah ditujukan pada penerapan *good governance* di seluruh pemerintahan daerah provinsi di Indonesia.

Makalah ini, pertama-tama akan membahas mengenai kajian literature berkaitan dengan prinsip-prinsip *governance* pada sektor publik yang berkembang di dunia international

serta usaha-usaha yang telah dilakukan di Indonesia dalam mengidentifikasi dan menerapkan prinsip-prinsip *good public governance*. Kemudian akan dibahas mengenai hasil analisis mengenai pengaruh kualitas penerapan *good governance* pada pemerintah daerah provinsi dengan kualitas pemberian layanan publik. Selanjutnya, sebagai penutup akan disampaikan beberapa kesimpulan berkenaan dengan hasil analisis dan beberapa saran untuk pengembangan penelitian selanjutnya.

Kajian Literatur

Perkembangan Good Public Governance di Dunia

Sejalan dengan perkembangan *new public management* yang mulai diterapkan dalam penyelenggaraan organisasi sektor publik di akhir dekade 1970 atau di awal 1980an, bentuk-bentuk awal prinsip *good public governance* publik juga sudah turut diterapkan. Hal ini karena ide dari *new public management* sebenarnya sama dengan ide *good governance* yaitu bertujuan untuk menerapkan nilai-nilai manajemen sektor swasta pada manajemen operasional sektor publik agar tujuan dari didirikannya suatu organisasi sektor publik dapat tercapai.

Heyer (2011) menyatakan bahwa yang dimaksud dengan penerapan program *new public management* adalah melakukan suatu tindakan yang memang ditujukan

untuk memperbaiki efisiensi dan efektifitas layanan publik serta organisasi layanan publik, dengan mempunyai suatu pandangan atau nilai yang mengedepankan pertanggungjawaban dan perbaikan pemberian layanan publik. Hood (1995) mengemukakan bahwa meskipun banyak ragam penjelasan mengenai *new public management*, tetapi terdapat beberapa kesamaan tema atau nilai yaitu adanya perubahan beberapa penekanan dari yang sebelumnya lebih menekankan pada pembuatan kebijakan publik berubah menjadi penekanan pada keahlian manajemen, dari penekanan pada proses berubah menjadi penekanan pada hasil, dari yang lebih bersifat perintah hierarkis yang kaku menjadi lebih bersifat kompetisi dalam pemberian layanan publik, dari penekanan tarif variabel serta layanan publik yang umum dan seragam menjadi struktur tarif yang bervariasi dengan lebih menekankan pada ketentuan-ketentuan kontrak yang telah sepakati.

Perkembangan selanjutnya dari *new public management* adalah menuju apa yang disebut dengan nama *new public governance* yang diperkenalkan sebagai upaya untuk menghadapi permasalahan penerapan kebijakan publik dan pemberian layanan publik yang semakin kompleks yang tidak dapat diatasi dengan hanya menerapkan *new public management*. Osborne (2011: 6)

membagi inti perhatian *public governance* menjadi lima sudut pandang yang saling berkaitan satu sama lain yang mempengaruhi kualitas layanan publik, yaitu sebagai berikut:

- *Socio-Political Governance*, berfokus pada hubungan kelembagaan di dalam masyarakat, dimana pemerintah bukan lagi sebagai pihak yang paling berkuasa atau yang paling menentukan dalam penyusunan kebijakan publik tetapi juga harus memperhatikan pelaku-pelaku lainnya di masyarakat agar diakui dan dipatuhi oleh semua pihak serta dapat memberikan pengaruh terhadap lingkungan.
- *Public Policy Governance*, berfokus pada interaksi diantara para elit politik dan jaringannya dalam menciptakan dan mengatur proses penyusunan kebijakan publik.
- *Administrative Governance*, berfokus pada efektifitas dalam pelaksanaan administrasi publik dan penempatan kembali fungsi administrasi publik sehingga dapat meliputi atau mencakup kerumitan permasalahan yang ada pada semua lini atau organisasi pemerintahan.
- *Contract Governance*, berfokus pada tatakerja NPM khususnya berkaitan dengan hubungan kontrak pengelolaan dalam pemberian layanan publik.

- *Network Governance*, berfokus pada bagaimana pengorganisasian secara otomatis jaringan-jaringan antar organisasi dapat berfungsi, dengan peranan atau tanpa peranan pemerintah, dalam pelaksanaan pemberian layanan publik.

Usaha lainnya dalam pengidentifikasian *good public governance* adalah yang dilakukan oleh *The International Federation of Accountants* (IFAC) bekerjasama dengan *The Chartered Institute of Public Finance & Accountancy* yang pada bulan Juni 2013 mengeluarkan *draft* dengan judul *an International Framework of Good Governance in the Public Sector*. Prinsip-prinsip penting *good public governance* yang diperkenalkan melalui *draft* ini antara lain berupa komitmen yang kuat terhadap integritas, nilai etika dan ketaatan terhadap hukum serta adanya keterbukaan dan ketelitian dalam pelaksanaan tugas. Selain itu, *draft* ini mengidentifikasikan bahwa fungsi utama dari penerapan *good public governance* adalah untuk memastikan bahwa organisasi sektor publik senantiasa bertindak bagi kepentingan masyarakat.

Good Public Governance di Indonesia

Di Indonesia masalah *governance* di sektor publik sudah mendapat perhatian yang cukup mendalam sejak pertengahan dekade

2000. Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG), yang dibentuk berdasarkan surat keputusan Menteri Koordinator Perekonomian RI No. KEP-49/ M.EKON/ II/ TAHUN 2004 tanggal 30 November 2004, mempunyai tugas untuk memperluas cakupan tugas sosialisasi *corporate governance* bukan hanya di sektor korporasi tetapi juga di sektor publik. Pada tahun 2008 KNKG berhasil menerbitkan Pedoman Umum *Good Public Governance* dengan tujuan untuk dijadikan acuan bagi lembaga-lembaga negara dan juga lembaga pemerintahan di Indonesia dalam melaksanakan *good public governance* antara lain dalam rangka untuk mendorong efektifitas penyelenggaraan negara serta mendorong timbulnya kesadaran dan tanggung jawab untuk memajukan dan mengutamakan kesejahteraan rakyat.

Selain KNKG, pihak dari luar pemerintahan pun telah melakukan upaya-upaya pengidentifikasian prinsip-prinsip *good public governance*, antara lain yang dilakukan oleh Kemitraan Bagi Pembaruan Tata Pemerintahan (*The Partnership for Governance Reform*) yang bekerjasama dengan *The Australian Agency for International Development* (AusAID). Hasil kerja mereka antara lain berupa Indonesia Governance Index (IGI) yaitu indeks kualitas penerapan *good governance* pada 33 pemerintah daerah provinsi di Indonesia (Gismar *et al*, 2013).

Menurut IGI, *governance* adalah suatu proses dalam rangka memformulasikan dan mengimplementasikan aturan-aturan, ketentuan-ketentuan dan prioritas-prioritas pembangunan melalui interaksi di antara para eksekutif dan para anggota legislatif serta melalui birokrasi dengan partisipasi dari masyarakat sipil maupun masyarakat ekonomi. *Governance* menurut IGI ini meliputi empat arena, dimana masing-masing arena mempunyai fungsi dan kinerja sendiri-sendiri yang jika disatukan maka secara bersama-sama akan menentukan kualitas *governance* pada setiap provinsi. Keempat arena tersebut meliputi *Government*, *Bureaucracy*, *Civil Society* dan *Economic Society*.

Government, merupakan lembaga-lembaga yang membuat kebijakan yang terdiri dari lembaga eksekutif dan juga lembaga legislatif, baik pada pemerintahan pusat maupun daerah. *Bureaucracy* adalah lembaga yang melaksanakan kebijakan-kebijakan yang telah dibuat pemerintah dan pada saat bersamaan juga menjadi jembatan penghubung antara pemerintah dengan masyarakat. *Civil Society* meliputi pihak-pihak diluar pemerintahan, antara lain organisasi nir laba, organisasi sosial, yayasan, serikat buruh, organisasi profesi, lembaga pendidikan dan penelitian. *Economic Society* meliputi entitas usaha dan organisasi-organisasi lainnya yang

bertujuan mencari laba atau yang melindungi kepentingan usahanya dengan melakukan perubahan ekonomi dan produksi, maupun yang memberikan advokasi dalam memperbaiki iklim usaha.

Pada masing-masing arena tersebut, IGI akan menilai enam prinsip *good governance* yaitu sebagai berikut:

1. *Participation* (Keikutsertaan), yaitu keterlibatan para pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan pada masing-masing arena.
2. *Fairness* (Kewajaran), yaitu suatu kondisi dimana kebijakan-kebijakan dan program-program diterapkan secara adil kepada setiap orang tanpa memperhatikan status, etnik, agama maupun gender.
3. *Accountability* (Kebertanggungjawaban), yaitu suatu kondisi dimana para pegawai, lembaga-lembaga dan organisasi-organisasi pemerintah pada setiap arena dibebankan tanggung jawab atas setiap tindakannya.
4. *Transparency* (Keterbukaan), yaitu suatu kondisi dimana keputusan yang diambil oleh para pegawai baik dalam lembaga pemerintahan, lembaga-lembaga sipil maupun organisasi-organisasi swasta, pada setiap arena, terbuka bagi masyarakat umum untuk diteliti,

dicermati, dan dievaluasi serta suatu kondisi dimana informasi publik tersedia dan mudah diperoleh.

5. *Efficiency*, yaitu suatu kondisi dimana kebijakan-kebijakan dan program-program yang dilakukan telah menggunakan sumber daya yang ada, seperti sumber daya manusia, keuangan dan juga waktu, secara optimal.
6. *Effectiveness*, yaitu suatu kondisi dimana kebijakan-kebijakan dan program-program yang dilakukan telah memperoleh hasil sesuai dengan yang direncanakan menggunakan sumber daya yang ada, seperti sumber daya manusia, keuangan dan juga waktu, secara optimal.

Pada bulan Agustus 2013 *The Partnership* (Kemitraan telah menerbitkan Indonesia Governance Index 2012 (IGI 2012). Isi dari IGI 2012 ini adalah berupa daftar peringkat kualitas penerapan *good publik governance* pada pemerintah daerah provinsi di seluruh Indonesia (Gismar *et al*, 2013).

Manfaat Penerapan Good Governance

Sternberg (2004) menjelaskan bahwa timbulnya kebutuhan akan *corporate governance* dikarenakan adanya pemisahan kepemilikan perusahaan dari manajemen operasional perusahaan. Ketika manajemen dipisahkan dari

kepemilikan dan khususnya jika kepemilikan perusahaan tersebar pada banyak pemegang saham, maka dapat dimungkinkan bagi para manajer untuk menjalankan perusahaan sesuai dengan kepentingan mereka sendiri. Kemungkinan seperti inilah yang menyebabkan diperlukannya suatu mekanisme untuk memastikan bahwa kegiatan-kegiatan perusahaan, para agen maupun aset-aset perusahaan dicurahkan sepenuhnya bagi pencapaian tujuan perusahaan.

Shleifer & Vishny (1997) menyatakan bahwa manfaat dari *corporate governance* adalah untuk mengatasi permasalahan agensi (permasalahan principal dengan agen), yaitu permasalahan antara manajemen perusahaan dengan penyandang dana, dalam hal ini untuk memberikan kepastian kepada para penyandang dana agar mereka memperoleh hasil dari investasinya. Rezaee (2007) megemukakan bahwa permasalahan agensi dapat berupa manajemen laba yang antara lain dengan menggeser biaya-biaya tahun ini ke periode berikutnya sehingga laba tahun ini menjadi lebih tinggi. Tujuan utama dari manajemen laba ini adalah agar bonus yang mereka terima juga lebih besar dari yang seharusnya.

Selain itu, masalah agensi dapat pula berupa pemberian informasi yang tidak akurat seperti laporan keuangan yang tidak benar, sehingga harga saham perusahaan meningkat tajam. Tujuan dari tindakan manajemen ini

adalah agar kinerja mereka dinilai bagus sehingga dapat dipilih lagi pada periode berikutnya serta memperoleh bonus yang lebih tinggi. Masalah agensi lainnya adalah berupa terfokusnya tujuan manajemen pada laba perusahaan jangka pendek yang dapat mengorbankan tujuan perusahaan dalam jangka panjang. Penerapan *good corporate governance* pada dasarnya bertujuan untuk menselaraskan kepentingan para pemegang saham dengan kepentingan manajemen perusahaan, sehingga masalah keagenan ini dapat diatasi atau diperkecil.

Untuk sektor publik, Ketua KNKG, Mas Achmad Daniri, antara lain mengemukakan bahwa penerapan *good governance* di sektor publik sangat diyakini akan memberikan kontribusi yang strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menciptakan iklim bisnis yang sehat, meningkatkan kemampuan daya saing, serta sangat efektif menghindari penyimpangan-penyimpangan dan sebagai upaya pencegahan terhadap tindakan korupsi dan suap (KNKG, 2008). Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia, Taufiq Effendi menyatakan bahwa penerapan *good public governance* mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap pelaksanaan *good corporate governance* oleh dunia usaha dan diharapkan keduanya dapat bersinergi dalam menciptakan pemerintahan

yang bersih dan berwibawa yang pada gilirannya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dan kesejahteraan rakyat (KNKG, 2008).

Stewardship Theory

Rashidpour dan Mazaheri (2013) menjelaskan bahwa berbeda dengan *agency theory* yang memandang para manajer termotivasi oleh tujuan pribadi, terutama yang berkaitan dengan faktor ekonomi, maka *stewardship theory* memandang manajer, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, termotivasi untuk melayani kebutuhan organisasi dan mengabdikan dirinya untuk pencapaian tujuan organisasi tersebut. Meskipun tidak ada yang dapat menentukan mana teori yang lebih baik diantara keduanya, tetapi ada satu hal yang penting untuk diperhatikan terkait kedua pendekatan ini yaitu bahwa para manajer maupun pekerja harus dapat dilihat dari arah yang tepat, apakah mereka termotivasi untuk pencapaian tujuan pribadi ataupun mereka termotivasi untuk mengabdikan pada tujuan organisasi.

Hasil penelitian Rashidpour dan Mazaheri (2013) menunjukkan bahwa pendekatan *stewardship* mempunyai hubungan yang erat dengan faktor-faktor *cultural*, *structural* dan *psychological*. Mereka berkesimpulan bahwa berkaitan dengan manajemen pada suatu lembaga/ organisasi publik, maka pendekatan *stewardship* lebih dapat diterima dibandingkan dengan pendekatan *agency*. Penelitian kali ini

berusaha untuk mengetahui apakah masih ada pengaruh penerapan *good governance* terhadap kinerja suatu organisasi masyarakat, dalam hal ini pemerintah daerah provinsi, dimana sesuai dengan teori *stewardship*, para aparat dan pejabat pemerintah daerah provinsi telah dianggap dan dipandang bekerja dengan motivasi pelayanan dan pengabdian.

Indeks Pembangunan Manusia

Konsep pembangunan manusia (*Human Development Concept*) dikemukakan pertama kali oleh Mahbub ul Haq, yang lahir pada tahun 1934 dan meninggal pada tahun 1998. Beliau antara lain mengemukakan bahwa tujuan dari pembangunan adalah menciptakan suatu lingkungan yang memungkinkan bagi masyarakat untuk dapat hidup lebih lama dan layak, memungkinkan bagi masyarakat untuk hidup sehat, serta memungkinkan bagi masyarakat untuk berkarya dalam hidupnya (<http://hdr.undp.org/en/humandev/>).

Amartya Sen (1998), menjelaskan bahwa *human development* atau pembangunan manusia adalah suatu pendekatan yang berkonsentrasi pada peningkatan kekayaan kehidupan manusia daripada berkonsentrasi pada kekayaan ekonomi suatu daerah atau tempat dimana manusia tersebut hidup (<http://hdr.undp.org/en/humandev/>).

Pendekatan pembangunan manusia telah memberikan dampak yang penting bagi kesejahteraan manusia.

Masyarakat sekarang bisa hidup lebih sehat, hidup lebih lama dan mempunyai akses yang lebih baik terhadap barang dan jasa. Penggunaan pendekatan pembangunan manusia merupakan suatu usaha yang relevan dan rasional dalam memperbaiki kehidupan dan kesejahteraan masyarakat

(<http://hdr.undp.org/en/humandev/>).

Human development index atau indeks pembangunan manusia (IPM) merupakan angka indikator yang diperkenalkan oleh *the United Nations Development Programme* (UNDP) guna mengukur tingkatan keberhasilan pembangunan suatu negara. Indeks ini menggunakan tiga dimensi yaitu *health* (kesehatan), *education* (pendidikan) dan *standard of living* (standar kehidupan yang layak).

Dimensi kesehatan yang diukur dari angka harapan hidup memberikan gambaran kemudahan masyarakat dalam menerima pelayanan kesehatan. Dimensi pendidikan diukur dari angka melek huruf dan rata-rata lamanya sekolah, memberikan gambaran ketersediaan sarana dan pelayanan pendidikan yang dapat digunakan publik dalam meningkatkan kemampuan dan keahlian mereka. Dimensi standar kehidupan yang layak yang diukur dari kemampuan daya beli masyarakat akan memberikan gambaran ketersediaan sarana dan layanan publik yang dapat digunakan masyarakat dalam memperoleh penghasilan guna memenuhi

kebutuhan mereka baik pangan, sandang dan papan (primer maupun sekunder).

Ketiga dimensi tersebut secara langsung dapat menyentuh kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, IPM dapat juga digunakan sebagai angka yang dapat menunjukkan atau memberikan gambaran tentang kepuasan masyarakat terhadap kinerja pembangunan suatu pemerintahan. Tingkatan kepuasan masyarakat ini dapat dipandang sebagai cerminan dari kualitas layanan publik yang diterima dan dirasakan mereka. Dengan demikian, untuk menilai kualitas pemberian layanan masyarakat, penelitian ini akan menggunakan IPM sebagai tolok ukur atau indikatornya.

Kerangka Penelitian

Penelitian-penelitian berkaitan dengan penerapan *good governance* yang ada selama ini kebanyakan adalah penelitian yang berkaitan dengan *good governance* pada dunia usaha atau sektor *private*. Pada umumnya peneliti-penelitian tersebut menunjukkan adanya pengaruh kualitas *good governance* terhadap kinerja perusahaan. Penelitian kali ini pun akan mengacu pada penelitian-penelitian sebelumnya tersebut, dimana variabel kualitas penerapan *good governance* pada sektor publik sebagai variabel bebas (independen) akan diukur berdasarkan peringkat kualitas penerapan *good public governance* 2012 pada Pemerintah Daerah Provinsi di Indonesia, yang

telah dipublikasikan oleh Indonesia Governance Index 2012.

Variabel dependen pada penelitian ini adalah berupa kinerja organisasi atau lembaga. Jika pada penelitian di sektor *private* variabel dependennya kebanyakan berupa kenaikan harga saham perusahaan di pasar modal, maka pada penelitian ini akan menggunakan data Indeks Pembangunan Manusia pada setiap pemerintah daerah provinsi di Indonesia yang dikeluarkan oleh Biro Pusat Statistik. Adapun nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang digunakan adalah rata-rata angka IPM dari tahun 2007 s.d 2012 untuk setiap provinsi.

Penelitian sebelumnya

Penelitian-penelitian berkaitan dengan *good governance* selama beberapa tahun belakangan ini antara lain dilakukan oleh Fuenzalida *et al* (2013) yang meneliti pengaruh penerapan *good governance* pada sejumlah perusahaan publik yang terdaftar di *Lima Stock Exchange*. Hasil penelitian mereka memberikan kesimpulan bahwa perusahaan-perusahaan yang menerapkan *good corporate governance* mempunyai *returns* rata-rata setiap bulannya 3% di atas perusahaan-perusahaan yang tidak menerapkan *good corporate governance*.

Prommin *et al.* (2014), yang meneliti pengaruh penerapan *corporate governance* pada perusahaan-perusahaan besar di

Thailand terhadap likuiditas saham, menemukan bahwa adanya hubungan yang signifikan antara *governance* dengan likuiditas saham. Hasil penelitian mereka memberikan kesimpulan bahwa kenaikan kualitas *governance* sebesar satu standard deviasi akan meningkatkan *liquidity ratio* sebesar 26.19%. Penelitian yang dilakukan oleh O'Connor *et al.* (2014) mengenai interaksi antara perlindungan hukum investor, *corporate governance* serta kemudahan investasi pada 1.510 perusahaan yang ada di 21 negara menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan dengan *governance* yang lebih baik, secara signifikan, akan mengalami kenaikan harga saham yang lebih besar.

Survei yang dilakukan oleh Iwasaksi (2014) terhadap 741 perusahaan besar dan menengah di Rusia yang telah diteliti sejak tahun 2005 menunjukkan bahwa sebanyak 104 dari perusahaan tersebut terpaksa keluar dari pasar saham selama tahun 2008 sampai dengan 2009 diakibatkan krisis keuangan global tahun 2008. Mereka menemukan bahwa unit kepatuhan *governance* suatu perusahaan yang terpisah atau independen dari pimpinan puncak manajemen perusahaan maupun dari pengaruh operasional manajemen perusahaan, secara statistik, merupakan faktor yang signifikan mempengaruhi kelangsungan hidup perusahaan. Hal yang sangat penting

dari penelitian ini adalah bahwa unit *corporate governance* suatu perusahaan dapat secara efektif mendisiplinkan pimpinan puncak manajemen perusahaan dan juga merupakan faktor yang penting dalam menentukan kemampuan kelangsungan hidup perusahaan.

Penelitian berkaitan dengan *governance* sektor publik antara lain dilakukan Earle dan Scott (2010) yang meneliti pengaruh *governance* terhadap usaha-usaha program pengurangan kemiskinan dan terhadap hasil-hasil pembangunan di negara yang sedang berkembang. Hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa *governance* yang rendah berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi dan juga usaha-usaha pengurangan kemiskinan.

Hipotesis Penelitian

Sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kualitas penerapan *good governance* terhadap kinerja pemerintah daerah provinsi. Dengan memperhatikan penelitian-penelitian sebelumnya di sektor bisnis, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H1: kualitas penerapan *good governance* pada lembaga pemerintahan daerah provinsi berpengaruh positif terhadap kinerja pembangunan daerah tersebut.

- H2:** tingkat pertumbuhan perekonomian pada suatu daerah provinsi berpengaruh positif terhadap kinerja pembangunan daerah tersebut.
- H3:** realisasi belanja per kapita pada suatu daerah provinsi berpengaruh positif terhadap kinerja pembangunan daerah tersebut
- H4:** besarnya produk domestik regional bruto pada suatu daerah provinsi berpengaruh positif terhadap kinerja pembangunan daerah tersebut.

Metode penelitian

Sesuai dengan hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini maka variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Indeks Pembangunan Manusia Provinsi (IPMP), penelitian ini menggunakan Indeks Pembangunan Manusia Provinsi sebagai variabel dependen dalam mengukur kualitas kinerja pembangunan daerah provinsi. Penggunaan IPM ini didasarkan pada apa yang dikemukakan oleh Biro Pusat Statistik bahwa IPM merupakan ukuran kinerja pembangunan secara keseluruhan. Penelitian ini akan menggunakan nilai rata-rata angka IPM tahun 2007 s.d 2012.
2. Kualitas Penerapan Good Governance (KPGG),

variabel ini merupakan variabel independen yang mewakili tingkat penerapan *governance* pada lembaga pemerintah di Indonesia. Penelitian ini akan menggunakan data kualitas penerapan *governance* yang dipublikasikan oleh Kemitraan Bagi Pembaruan Tata Pemerintahan (*The Partnership for Governance Report*) berupa Indonesia Governance Index 2012 (IGI 2012).

3. Tingkat Pertumbuhan Perekonomian Provinsi (TPPP), penelitian ini menggunakan tingkat pertumbuhan perkonomian daerah provinsi sebagai variabel independen. Hal ini mengacu pada apa yang dikemukakan oleh BPS bahwa TPPP menunjukkan tingkat hasil pembangunan suatu daerah. Data tingkat pertumbuhan perekonomian yang akan digunakan adalah data tingkat pertumbuhan perekonomian provinsi di Indonesia selama tahun 2012 yang dipublikasikan oleh BPS.
4. Realisasi Belanja Provinsi Perkapita (RBPP), penelitian ini menggunakan realisasi belanja daerah sebagai variabel independen. Belanja daerah merupakan pengeluaran daerah yang antara lain digunakan untuk kegiatan rutin, seperti belanja pegawai maupun

kegiatan non rutin seperti belanja modal, dimana pengeluaran-pengeluaran tersebut dilakukan dalam rangka melaksanakan pembangunan daerah. Data realisasi belanja daerah yang akan digunakan adalah data realisasi belanja daerah per kapita tahun 2012 untuk setiap provinsi di Indonesia yang dikeluarkan oleh BPS.

5. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), penelitian ini menggunakan nilai produk domestik regional bruto (PDRB) sebagai variabel independen. Nilai PDRB suatu daerah dapat diartikan sebagai kemampuan semua elemen suatu daerah dalam memperoleh penghasilan. Nilai PDRB suatu daerah pada dasarnya akan meningkatkan kemakmuran dan daya beli masyarakat daerah tersebut sehingga akan lebih mampu mengusahakan kehidupan yang lebih layak. Data nilai PDRB yang akan digunakan adalah data PDRB tahun 2012 untuk setiap provinsi di Indonesia yang dikeluarkan oleh BPS.

Model Analisis

Model analisis yang digunakan dalam menguji hipotesis tersebut adalah model analisis regresi linear, yang persamaannya adalah sebagai berikut:

$$IPMP = \alpha + \beta_1(KPGG) + \beta_2(TPPP) + \beta_3(RBPP) + \beta_4(PDRB) + \varepsilon,$$

dimana:

α = konstanta

IPMP = Indeks Pembangunan Manusia Provinsi

KPGG = Kualitas Penerapan Good Governance

TPPP = Tingkat Pertumbuhan Perkonomian Provinsi

RBPP = Realisasi Belanja Provinsi Perkapita

PDRB = Produk Domestik Regional Bruto

ε = error

Hasil Penelitian

Model summary (tabel 1) menunjukkan bahwa sebesar 41,80% variasi dari IPMP dapat dijelaskan oleh variasi dari keempat variable independen yang digunakan yaitu PDRB, TPPP, RBPP dan KPGG. Sisanya sebesar 58,20% dijelaskan oleh sebab-sebab lain diluar model.

Tabel 1: Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.701 ^a	.491	.418	2.37844

a. Predictors: (Constant), PDRB, TPPP, RBPP, KPGG

b. Dependent Variable: IPMP

Dari *statistic description* (tabel 2) dapat diketahui bahwa rata-rata angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) setiap provinsi di Indonesia adalah sebesar 70,34 (skala 100), dimana IPM yang terendah 63,35 yaitu untuk provinsi Papua dan yang tertinggi 76,68 yaitu untuk provinsi DKI Jakarta. Tingkat kualitas penerapan *good governance* (KPGG) yang tertinggi adalah pada pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan nilai 6,80 (Skala10) dan yang terendah pada pemerintah daerah provinsi Maluku Utara dengan nilai 4,45. Adapun rata-rata KPGG untuk seluruh pemerintah daerah provinsi di Indonesia adalah sebesar 5,70.

Tingkat pertumbuhan perekonomian provinsi (TPPP) di Indonesia rata-rata adalah sebesar 6,25% dimana provinsi yang mengalami tingkat pertumbuhan tertinggi adalah provinsi Sulawesi Tenggara dengan tingkat pertumbuhan sebesar 10,41%. Provinsi yang

mengalami tingkat pertumbuhan terendah adalah provinsi Nusa Tenggara Barat dengan tingkat pertumbuhan negative 1,12%.

Rata-rata realisasi belanja provinsi per kapita (RBPP) adalah sebesar Rp.3.906.850,- dengan RBPP tertinggi sebesar Rp.14.145.000,- yaitu pada provinsi Papua Barat dan yang terendah adalah yang dialami oleh provinsi Jawa Barat dengan nilai RBPP sebesar Rp.1.413.000. Produk domestik regional bruto (PDRB) yang tertinggi adalah yang dialami oleh provinsi DKI Jakarta dengan nilai PDRB sebesar Rp.1.103.738.000.000.000,- dan PDRB yang terendah dialami oleh provinsi Maluku Utara dengan nilai sebesar Rp.6.918.000.000.000,-. Rata-rata nilai PDRB untuk seluruh provinsi di Indonesia adalah sebesar Rp.203.985.848.000.000,-.

Tabel 2: Statistic Description

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
IPMP	33	63.35	76.68	70.3368	3.118009
KPGG	33	4.45	6.80	5.6977	.57930
TPPP	33	-1.12	10.41	6.2506	2.26278
RBPP	33	1413	14145	3906.85	2562.900
PDRB	33	6918000	1103738000	203985848	2.952000008
Valid N (listwise)	33				

Uji Asumsi Klasik

Untuk uji normalitas data, peneliti menggunakan nilai Kolmogorov-Smirnov (tabel 3), yang menunjukkan angka sebesar 0,544 dan

tidak signifikan pada 0,05 ($p = 0,929$, $p > 0,05$). Hasil tersebut menunjukkan bahwa data penelitian ini terdistribusi secara normal (Ghozali, 2012).

Tabel 3: One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		33
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.00000000
Most Extreme Differences	Absolute	.095
	Positive	.095
	Negative	-.084
Kolmogorov-Smirnov Z		.544
Asymp. Sig. (2-tailed)		.929

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Hasil dari analisis varian (tabel 4) menunjukkan tingkat probabilitas lebih kecil dari 0.05 ($p = 0.001$, $p < 0.05$). Hasil ini memberikan kesimpulan bahwa variable KPGG, TPPP, RBPP dan PDRB secara bersama-sama berpengaruh terhadap IPMP dan model regresi penelitian ini dapat digunakan untuk memprediksi IPMP.

Tabel 4: Anova

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	152.723	4	38.181	6.749	.001 ^a
	Residual	158.395	28	5.657		
	Total	311.119	32			

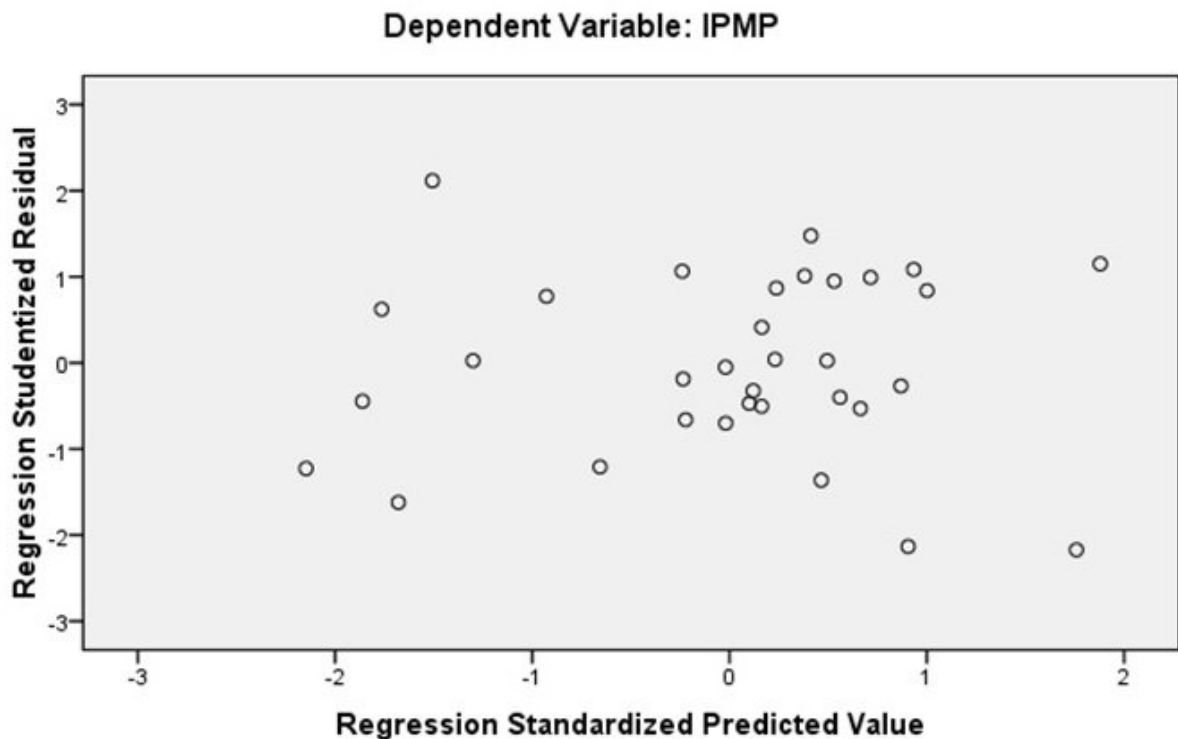
a. Predictors: (Constant), kenaikan PDRB, TPPP, RBPP, KPGG

b. Dependent Variable: kenaikan IPMP

Hasil analisis grafik *scatterplot* (gambar 1) menunjukkan tidak adanya pola tertentu pada grafik tersebut serta titik-titik terlihat menyebar di atas dan

di bawah angka 0. Hasil tersebut memberikan kesimpulan tidak terjadinya heteroskedasitas.

Gambar 1: Grafik Scatterplot *)



*) disadur dari hasil analisis dengan menggunakan program SPSS

Koefisien korelasi antar variabel independen (tabel 5) menunjukkan bahwa tidak adanya koefisien korelasi di atas 0.5 antara satu variabel dengan variabel lainnya. Koefisien korelasi yang terbesar

adalah sebesar 0.463 yaitu antara variable realisasi belanja per kapita (RBPP) dengan kualitas penerapan good governance (KPGG). Hal ini menunjukkan tidak adanya

multikolinearitas diantara variabel independen.

Tabel 5: Coefficient Correlations

	KPGG	TPPP	RBPP	PDRB
KPGG	1.000	.076	.463	-.333
TPPP	.076	1.000	.319	.085
RBPP	.463	.319	1.000	.050
PDRB	-.333	.085	.050	1.000

Analisis Regresi

Hasil analisis regresi (tabel 6) menunjukkan bahwa kualitas penerapan *good governance* mempunyai koefisien regresi sebesar 3.347 yang menunjukkan bahwa setiap perbedaan kualitas penerapan *good governance* sebesar 1 akan menaikkan Indeks Pembangunan Manusia sebesar 3,35 dengan tingkat kemungkinan yang signifikan sebesar 0.001 ($p= 0.001, p< 0.01$). Hasil ini mendukung H1 yaitu bahwa kualitas penerapan *good governance* pada lembaga pemerintahan daerah provinsi berpengaruh positif terhadap kinerja

pembangunan daerah tersebut. Oleh karena itu H1 diterima.

Tingkat pertumbuhan perekonomian provinsi mempunyai koefisien regresi sebesar 0.51 menunjukkan bahwa setiap kenaikan tingkat pertumbuhan perekonomian sebesar 1% akan menaikkan angka Indeks Pembangunan Manusia sebesar 0,51 dengan tingkat kemungkinan yang signifikan ($p= 0.015, p< 0.05$). Hasil ini mendukung H2 yaitu bahwa tingkat pertumbuhan perekonomian pada suatu daerah provinsi berpengaruh positif terhadap kinerja pembangunan daerah tersebut. Oleh karena itu H2 diterima.

Tabel 6: Hasil Analisis Regresi

Coefficients

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	46.029	5.724		8.042	.000
KPGG	3.347	.896	.622	3.735	.001
TPPP	.510	.197	.370	2.588	.015
RBPP	.000	.000	.334	2.030	.052
PDRB	2.227E9	.000	.211	1.428	.164

a. Dependent Variable: kenaikan IPMP

Jumlah realisasi belanja provinsi per kapita mempunyai koefisien regresi sebesar 0,000 menunjukkan bahwa pengaruh besarnya realisasi belanja untuk setiap penduduk terhadap kenaikan IPM sangat kecil sekali (mendekati tidak ada) dengan tingkat kemungkinan yang cukup signifikan sebesar 0.052 ($p= 0.052, p < 0.1$). Peneliti menyimpulkan bahwa hasil ini tetap mendukung H3 yaitu bahwa realisasi belanja per kapita pada suatu daerah provinsi berpengaruh positif terhadap kinerja pembangunan daerah tersebut. Oleh karena itu H3 diterima.

Pengaruh besarnya produk domestik regional bruto suatu daerah provinsi terhadap IPM mempunyai kemungkinan yang tidak signifikan yaitu sebesar 0,164 ($p= 0.164 > 0,10$). Oleh karena itu, hasil ini tidak mendukung H4 yaitu bahwa besarnya produk domestik regional bruto pada suatu daerah provinsi berpengaruh positif terhadap kinerja pembangunan daerah tersebut. Oleh karena itu H4 ditolak.

Kesimpulan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada lembaga pemerintah di Indonesia, yang dalam penelitian ini adalah pemerintah daerah provinsi, ternyata telah terdapat usaha-usaha untuk menerapkan *good governance*. Berdasarkan hasil analisis regresi dapat disimpulkan bahwa kualitas penerapan *good governance* pada suatu pemerintah daerah provinsi

merupakan faktor yang berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah dalam pemberian layanan masyarakat. Selain itu, pertumbuhan perekonomian suatu daerah provinsi dan realisasi belanja provinsi per kapita mempunyai pengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah, sedangkan besarnya produk domestik regional bruto tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah provinsi.

Temuan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan kepada seluruh pemerintah daerah di Indonesia, bahwa penerapan *good governance* dengan kualitas yang tinggi akan dapat lebih menjamin tercapainya kinerja suatu pemerintah daerah. Penelitian selanjutnya dapat diperluas pada penerapan *good governance* di pemerintah daerah kabupaten/ kota di seluruh Indonesia. Selain itu, para peneliti selanjutnya dapat pula mengganti variabel dependen yang dalam penelitian ini adalah indeks pembangunan manusia dengan variabel lain seperti penurunan tingkat korupsi, penurunan tingkat kemiskinan atau indikator kinerja lainnya.

Referensi

Earle, Lucy., dan Scott, Zoe. 2010. *Assessing the Evidence of the Impact of Governance on Development Outcomes and Poverty Reduction*. UK:

*Governance and Social
Development Resource Centre.*

- Fuenzalida, Darcy., Mongrut, Samuel., Arteaga, JaimeRaul., and Erausquin,. 2013. Good Corporate Governance: Does it pay in Peru ?. *Journal of Business Research*, 66: 1759 – 1770.
- Heyer, Garth., 2011. New Public Management, a Strategy for Democratic Police Reform in Transitioning and Developing Countries. *International Journal of Police Strategies & Management*, 34 (3): 419-433.
- Hood, Christopher., 1995. The ‘New Public Management’ in The 1980s : Variations on a Theme. *Accounting Organizations and Society*, 20 (2/3): 93-109.
- Gismar, Abdul Malik et al., 2013. Towards a Well-Informed Society and Responsive Government: Executive Report Indonesia Governance Index 2012. *Jakarta, Indonesia: The Partnership for Governance Reform.*
- Ghozali, Imam., 2012. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS edisi ke 6.* Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- <http://hdr.undp.org/en/humandev/>. The Human Development Concept. 2014. Diunduh pada tanggal 13 Juni 2014 pk.10.55.
- Iwasaki, Ichiro., 2014. Global Financial Crisis, Corporate Governance, and Firm Survival: The Russian Experience. *Journal of Comparative Economics*, 42: 178 – 211.
- International Federation of Accountants (IFAC) and The Chartered Institute of Public Finance & Accountancy. 2013. *Consulting Draft June 2013 : Good Governance in the Public Sector- an International Framework.*
- KNKG (Komite Nasional Kebijakan Governance). 2008. *Pedoman Umum Good Public Governance*, <http://knkg-indonesia.com/home/>, diunduh pada tanggal 21 Mei 2014, pk. 12.45.
- O’Connor, Thomas., Kinsella, Stephen., and O’Sullivan, Vincent. 2014. Legal Protection of Investors, Corporate Governance, and Investable Premia in Emerging Market. *International Review of Economics and Finance*, 29: 426-439.
- Osborne, Stephen P., 2010. *The New Public Governance? Emerging Perspectives on The Theory and Practice of Public Governance.* London: Routledge
- Prommin, Panu., Jumreornvong, Seksak., and Jiraporn, Pornsit., 2014. The Effect of Corporate on Stock Liquidity: The Case of Thailand. *International Review of Economics and Finance.*
- Rashidpour, Ali., & Mazaheri M. Mahdi., 2013. Evaluation of

Agency and Stewardship Approach in four units of the Islamic Azad University and Prediction of Their Potential Productivity. *Arabian Journal of Business and Management Review*, 3 (5): .34-42.

Rezaee, Z., 2007. *Corporate Governance Post-Sabanes-Oxley: Regulations, Requirements, and Integrated Processes*. New Jersey: John Wiley & Sons, Inc

Shleifer, A., and Vishny, Robert W., 1997. A Survey of Corporate Governance. *The Journal of Finance*, 52 (2):.737-783.

Sternberg, E. 2004. *Corporate Governance: Accountability in The Marketplace*. London: The Institute of Economic Affairs.

The Indonesian Institute for Corporate Governance,
<http://iicg.org/v25/tata-kelola-perusahaan>, diunduh pada tanggal 10 Maret 2014, pk. 21.58.